



Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Keluarga Miskin di Kota Ambon

Gracia Meilani Djabumir^{1*}, Normawaty², Hengky V.R. Pattimukay³, Julia Theresia Patty⁴

¹⁻⁴ Universitas Pattimura, Indonesia

Alamat: Jalan IR.Putuhena Nomor 77 Poka, Ambon

Korespondensi penulis: graciadjabumir@gmail.com

Abstract. *This study was conducted to enrich the literature and scientific understanding of the phenomenon of poverty, especially in urban contexts such as Ambon City. The method applied in this study is Qualitative with in-depth interview techniques. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the Evaluation of Poor Family Protection Policy in Ambon City. shows that although the poor family protection policy in Ambon City provides benefits, there are obstacles in accessibility, coordination between agencies, and budget limitations that hinder program optimization. In addition, dependence on assistance and lack of community participation in policy planning are factors that inhibit its effectiveness. This study suggests improving the reporting and evaluation system, increasing coordination between agencies, and empowering the community to support the sustainability off the program.*

Keywords: *Evaluated, Poverty, Qualitative*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya literatur dan pemahaman ilmiah tentang fenomena kemiskinan, khususnya di konteks perkotaan seperti Kota Ambon. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Perlindungan Keluarga Miskin Di Kota Ambon. menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon memberikan manfaat, terdapat kendala dalam aksesibilitas, koordinasi antar instansi, dan keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi program. Selain itu, ketergantungan pada bantuan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan menjadi faktor penghambat efektivitasnya. Penelitian ini menyarankan perbaikan sistem pelaporan dan evaluasi, peningkatan koordinasi antar instansi, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata kunci: Evaluasi, Kemiskinan, Kualitatif

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan yang telah melekat dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Masalah ini bukan hanya menyangkut kurangnya pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar yang layak seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Meski berbagai pendekatan telah dicoba, belum ada satu pun yang dianggap paling efektif dan menyeluruh dalam menyelesaikan persoalan ini. Kompleksitas kemiskinan memunculkan beragam teori untuk menjelaskannya, yang masing-masing memiliki fokus berbeda, seperti teori ekonomi klasik, struktural, hingga pendekatan sosial budaya. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat serta harus diperbaharui secara berkelanjutan.

Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi persoalan utama yang belum terselesaikan sepenuhnya. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan sejak masa Orde Baru hingga sekarang, persoalan ini tetap menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan karena menyangkut langsung dengan kesejahteraan rakyat. Krisis multidimensional yang masih dialami Indonesia turut memperburuk kondisi ini. Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi, pengangguran, dan akses terbatas terhadap layanan dasar menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, pembangunan yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur harus meletakkan pengurangan kemiskinan sebagai landasan utama dari segala kebijakan.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menjadi titik balik yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebelum krisis, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat selama lebih dari tiga dekade, yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. Namun, dalam sekejap, krisis tersebut meruntuhkan stabilitas ekonomi nasional, menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat kemiskinan meningkat drastis. Hal ini menandai perlunya pendekatan baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memprioritaskan aspek pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya.

Dampak krisis ekonomi tidak hanya menghapus berbagai capaian positif dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga menciptakan situasi baru yang lebih kompleks. Masyarakat yang sebelumnya berhasil keluar dari kemiskinan kembali terjerumus ke dalam kondisi miskin akibat kehilangan sumber penghasilan dan minimnya perlindungan sosial. Pemerintah kemudian memprioritaskan kembali program-program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Fokus tidak hanya pada pemulihan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial, pembangunan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal agar mereka tidak mudah terdampak oleh gejolak ekonomi yang sewaktu-waktu bisa terjadi lagi.

Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial yang saling berkaitan. Faktor-faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan yang layak, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lemahnya ketahanan pangan menjadi penyebab utama kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Individu yang tidak mendapatkan pendidikan berkualitas cenderung sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sedangkan masyarakat yang hidup di wilayah tanpa fasilitas kesehatan rentan terhadap gangguan kesehatan yang menambah beban ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan

kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai dimensi sosial yang mempengaruhinya.

Sebagai masalah global, kemiskinan telah menjadi perhatian banyak negara dan organisasi internasional. Salah satu langkah awal yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan adalah menyepakati definisi dan kriteria yang digunakan untuk mengukurnya. Hal ini dibutuhkan agar setiap program yang dibuat dapat merujuk pada data yang akurat dan konsisten. Kesepahaman ini juga memungkinkan evaluasi dan pengukuran keberhasilan program dilakukan secara sistematis. Penguatan sistem data kemiskinan nasional maupun daerah sangat penting, agar setiap intervensi kebijakan benar-benar menasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sesuai dengan kondisi dan tantangan spesifik di wilayah masing-masing.

Secara umum, kemiskinan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini biasanya diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat yang berada di bawah garis tersebut sering kali sangat rentan dan membutuhkan bantuan langsung dari negara untuk dapat bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, intervensi berupa bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mencegah kemiskinan menjadi lebih parah.

Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif bersifat lebih kontekstual dan ditentukan oleh standar hidup masyarakat sekitar. Dalam pendekatan moneter, seseorang dikatakan miskin secara relatif jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata penduduk di sekitarnya. Sedangkan dalam pendekatan non-moneter, indikator seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi sosial turut menentukan status kemiskinan. Karena sifatnya yang lebih subyektif, seseorang bisa dianggap miskin di satu wilayah tetapi tidak di wilayah lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang kemiskinan relatif penting untuk mendesain program pembangunan yang inklusif dan adil sesuai karakteristik daerah.

Meski Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan selama beberapa dekade terakhir, tantangan besar masih membayangi. Pemerintah terus mengembangkan program-program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, dan berbagai intervensi lainnya. Namun, peristiwa seperti pandemi, bencana alam, dan krisis ekonomi global kerap memicu kembalinya masyarakat ke kondisi miskin. Sektor informal yang menjadi tumpuan utama masyarakat berpenghasilan rendah juga sangat rentan terhadap gangguan ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang

lebih adaptif dan berkelanjutan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak mudah tergerus oleh krisis yang datang tiba-tiba.

Tantangan kemiskinan di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga terkait erat dengan ketimpangan sosial. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan menjadi hambatan utama dalam menciptakan kesetaraan. Meskipun angka kemiskinan absolut menurun, kesenjangan sosial dan ekonomi antardaerah, khususnya antara kawasan barat dan timur Indonesia, masih tinggi. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, di mana wilayah-wilayah tertinggal diberikan perhatian khusus melalui peningkatan infrastruktur dasar, pelatihan keterampilan, serta dukungan kewirausahaan lokal agar masyarakatnya mampu berdiri secara mandiri.

Wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mencatat angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah barat. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar yang minim, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau memperburuk keadaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 26,8%. Hal ini menandakan perlunya pendekatan pembangunan yang khusus dan terintegrasi bagi wilayah-wilayah tertinggal, termasuk peningkatan aksesibilitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar kesejahteraan dapat tumbuh secara merata.

Selain faktor geografis, pembangunan ekonomi di wilayah timur Indonesia cenderung belum merata. Potensi sumber daya alam yang besar seperti hasil laut dan pertambangan belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketergantungan terhadap sektor pertanian dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim juga membuat pendapatan masyarakat tidak stabil. Kurangnya akses terhadap teknologi, modal, dan pelatihan menjadi tantangan besar yang menghambat produktivitas. Pemerintah telah mencoba merespons dengan berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi lokal, namun implementasinya masih memerlukan evaluasi dan pengawasan yang ketat agar hasilnya lebih maksimal.

Di Kota Ambon, kemiskinan juga menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kota Ambon mengalami peningkatan dari 4,68% menjadi 5,25%. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Maluku, tren peningkatan tersebut

menunjukkan adanya permasalahan struktural yang belum terselesaikan. Penduduk miskin di Ambon menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja. Dengan populasi sekitar 354.000 jiwa, jumlah penduduk miskin di kota ini cukup signifikan sehingga perlu langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengatasinya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Keluarga Miskin. Perda ini bertujuan memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Perda ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal dalam upaya memberikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pokok secara lebih efektif. Peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya dari kerentanan ekonomi serta mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 dapat berjalan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan perda ini dapat memberikan gambaran mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih strategis. Dengan melihat fenomena peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih terjadi, maka penelitian berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Keluarga Miskin di Kota Ambon” diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengeksplorasi berbagai aspek yang memengaruhi implementasi kebijakan, termasuk faktor sosial, budaya, serta kebijakan yang berlaku. Dengan memahami konteks dan pengalaman para pemangku kepentingan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, karena kota ini menjadi lokasi pelaksanaan kebijakan yang akan dievaluasi. Peneliti akan mengunjungi langsung Dinas Sosial Kota Ambon sebagai instansi utama yang menjadi fokus kajian. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama satu bulan penuh pada tahun 2025, dimulai setelah seminar proposal. Kegiatan penelitian meliputi persiapan pengumpulan data, pelaksanaan wawancara, observasi lapangan, hingga analisis dan penyusunan laporan. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Ambon dalam konteks pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Untuk menggali data, peneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara yang terdiri atas pertanyaan terbuka mengenai program, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Informan penelitian dipilih secara purposif, yakni berdasarkan pertimbangan relevansi dan penguasaan terhadap topik yang diteliti. Informan terdiri atas Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, staf pelaksana program, keluarga miskin sebagai penerima manfaat, dan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Total informan sebanyak sepuluh orang, yang terdiri atas informan kunci maupun pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memahami pelaksanaan kebijakan. Wawancara bertujuan menggali pandangan dan pengalaman para informan, sementara dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang relevan, seperti laporan program dan catatan administratif.

Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut dianalisis dengan mengikuti tahapan menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, penyajian data dilakukan secara sistematis untuk memudahkan penarikan makna dan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati dan diverifikasi untuk memastikan validitas hasil analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh mengenai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Di Kota Ambon, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Kebijakan ini mencakup berbagai program,

seperti bantuan sosial, akses terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Evaluasi kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon dalam penelitian ini didasarkan pada indikator yang dikembangkan oleh W. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan responsivitas. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah berhasil dalam mengurangi kemiskinan, seberapa efisien sumber daya digunakan, apakah bantuan yang diberikan mencukupi kebutuhan keluarga miskin, serta apakah kebijakan ini diterapkan secara adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala Dinas Sosial, pegawai Dinas Sosial, masyarakat miskin sebagai penerima manfaat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang sosial. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Ambon.

Dimensi Efektivitas

Kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Meski tujuan kebijakan ini sudah jelas, realisasinya belum sepenuhnya efektif. Banyak kendala ditemukan di lapangan seperti keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan sasaran bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon menyampaikan bahwa walaupun beberapa program telah menunjukkan hasil positif, evaluasi masih diperlukan agar program benar-benar menjangkau keluarga yang paling membutuhkan dan tidak hanya bersifat simbolik.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Beberapa program bantuan untuk anak-anak sekolah dan pengobatan telah dijalankan, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami cara mengaksesnya. Selain itu, keterbatasan fasilitas di daerah terpencil juga

menjadi hambatan tersendiri. Seorang pegawai Dinas Sosial menyebutkan bahwa sosialisasi harus ditingkatkan agar seluruh lapisan masyarakat bisa memanfaatkan program yang ada dan tidak ada yang tertinggal dari pelayanan tersebut.

Manfaat kebijakan ini mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat. Salah satu penerima bantuan mengatakan bahwa anaknya dapat bersekolah karena bantuan pemerintah. Namun, kebutuhan lain seperti biaya transportasi masih menjadi beban. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan belum menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat miskin. Kebijakan perlu memperhitungkan berbagai kebutuhan pendukung agar akses terhadap pendidikan dan layanan lainnya tidak hanya bersifat formal tetapi juga fungsional dalam kehidupan sehari-hari.

Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan usaha telah dilaksanakan. Namun, hasilnya belum merata karena kemampuan setiap penerima bantuan berbeda. Sebagian berhasil meningkatkan pendapatannya, sementara yang lain masih kesulitan menjalankan usaha. Seorang perwakilan LSM mengungkapkan bahwa pendampingan jangka panjang sangat penting agar bantuan modal benar-benar efektif. Tanpa pendampingan, bantuan yang diberikan bisa tidak berkembang atau bahkan sia-sia karena kurangnya pengetahuan dalam mengelola usaha.

Pemerintah juga mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dari kebijakan perlindungan sosial ini. Bantuan yang bersifat jangka pendek dinilai belum cukup untuk mengubah kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, program yang mendorong kemandirian ekonomi melalui keterampilan kerja dan akses modal menjadi perhatian penting. Pegawai Dinas Sosial menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan agar keluarga miskin bisa keluar dari ketergantungan terhadap bantuan dan memiliki sumber penghasilan tetap yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial menambahkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat program pemberdayaan yang sudah berjalan. Tidak hanya bantuan material, tetapi juga pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk membangun kapasitas masyarakat. Kolaborasi ini dianggap penting agar program sosial tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki dampak positif, namun efektivitasnya belum merata. Ada program yang berhasil menjangkau sasaran dengan baik, namun ada pula yang belum berjalan optimal. Hal ini menandakan bahwa strategi pelaksanaan kebijakan perlu diperbaiki. Selain itu, evaluasi berkala dan mekanisme pengawasan yang transparan juga harus diperkuat agar pelaksanaan kebijakan tetap sesuai dengan tujuan awal yaitu menurunkan angka kemiskinan secara nyata.

Secara umum, efektivitas kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon masih memerlukan berbagai perbaikan. Pemerintah telah memulai langkah-langkah positif, namun implementasinya belum konsisten di semua lini. Untuk itu, perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tepat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan evaluasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan ke depan. Harapannya, dengan langkah-langkah ini, tujuan utama kebijakan dapat tercapai secara lebih adil dan menyeluruh.

Dimensi Efisiensi

Efisiensi kebijakan perlindungan keluarga miskin menekankan pada bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk memberikan hasil maksimal. Besarnya anggaran tidak menjamin keberhasilan program jika tidak dikelola dengan tepat. Dalam konteks Kota Ambon, meskipun alokasi anggaran meningkat, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa sebagian program telah menunjukkan hasil, namun masih perlu dievaluasi lebih dalam agar dana yang digunakan bisa memberikan manfaat maksimal bagi keluarga miskin.

Optimalisasi sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi tantangan lain dalam pelaksanaan kebijakan ini. Terbatasnya jumlah tenaga kerja sosial serta belum memadainya sistem distribusi bantuan menyebabkan proses penyaluran tidak selalu efisien. Pegawai Dinas Sosial menyampaikan bahwa meskipun sudah dilakukan digitalisasi data penerima bantuan, sistem administrasi dan logistik masih perlu ditingkatkan agar pelayanan bisa berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan menghindari keterlambatan dalam distribusi bantuan yang sering terjadi.

Tumpang tindih antarprogram juga menjadi penyebab rendahnya efisiensi. Beberapa keluarga menerima bantuan dari berbagai program yang serupa, sementara yang lain justru tidak mendapatkan apa pun. Pemerintah Kota Ambon telah berupaya memperbaiki database penerima manfaat agar distribusi bantuan lebih adil. Koordinasi antarlembaga diperkuat

untuk menghindari duplikasi dan mengarahkan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah efisiensi yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan sosial.

Kecepatan penyaluran bantuan menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi. Dalam kondisi mendesak seperti bencana atau pandemi, bantuan harus dapat diterima dengan cepat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya keterlambatan yang cukup sering terjadi. Salah satu penerima manfaat menyebutkan bahwa meskipun bantuan sering datang, kadang waktunya terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak. Hal ini menandakan bahwa sistem distribusi masih memiliki banyak celah yang perlu dibenahi agar bantuan lebih tepat waktu.

Efisiensi juga menyangkut rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan dampak yang dihasilkan. Jika bantuan tidak tepat sasaran atau datang terlambat, maka biaya tersebut menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat. Dengan demikian, kebijakan yang dilaksanakan bisa dipastikan benar-benar memberikan dampak sosial yang sebanding dengan anggaran yang digunakan, dan tidak menimbulkan pemborosan yang merugikan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, efisiensi juga dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang penyalahgunaan anggaran atau pelaksanaan program yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program menjadi penting. Pemerintah Kota Ambon mulai mendorong partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah atau evaluasi, agar pengawasan berjalan dari dua arah dan kebijakan tetap berada dalam jalur yang benar.

Meskipun telah ada beberapa perbaikan, tantangan dalam meningkatkan efisiensi kebijakan masih cukup besar. Evaluasi menyeluruh terhadap setiap program perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui bagian mana yang paling efektif dan mana yang perlu dihentikan. Sumber daya juga harus dialokasikan secara proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, kebijakan tidak hanya hemat biaya tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat miskin.

Dimensi Kecukupan

Kebijakan perlindungan sosial di Kota Ambon dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin agar mereka dapat hidup lebih layak. Berbagai jenis bantuan telah diberikan, seperti bantuan tunai dan program peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam memenuhi kebutuhan dasar masih dipertanyakan. Sebagian penerima manfaat merasa bantuan yang diberikan cukup, tetapi banyak juga yang merasa kurang, terutama terkait kebutuhan kesehatan dan perumahan. Proses pendataan dan distribusi bantuan juga menjadi tantangan yang memengaruhi keberhasilan program ini.

Bantuan sosial yang diterima keluarga miskin membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan pendidikan anak-anak. Namun, banyak yang merasa bantuan belum mencukupi kebutuhan lain, seperti perumahan dan akses kesehatan yang layak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat.

Para pegawai yang terlibat dalam penyaluran bantuan mengakui tantangan yang ada dalam implementasi kebijakan ini. Mereka berusaha memastikan bantuan tepat sasaran dan menyentuh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Namun, kendala dalam administrasi dan anggaran yang terbatas seringkali menghambat proses ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya keras, masih banyak yang harus diperbaiki agar kebijakan ini lebih efektif.

Masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial merasakan dampaknya secara langsung. Meskipun bantuan memberi sedikit keringanan, masih banyak kesulitan yang mereka hadapi, seperti kebutuhan untuk membayar biaya sekolah dan biaya kesehatan. Masyarakat merasa bantuan tidak sepenuhnya mencakup seluruh kebutuhan mereka, yang menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan.

Selain pemberian bantuan, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan bantuan dalam jumlah yang cukup dan cakupan yang lebih luas. Namun, apakah jumlah dan cakupan bantuan ini cukup untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan masih dipertanyakan. Idealnya, bantuan sosial harus mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga miskin, bukan hanya bersifat sementara.

Para pegawai yang terlibat dalam penyaluran bantuan juga menyatakan bahwa jumlah bantuan yang tersedia terbatas. Namun, mereka terus berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar bantuan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi penerima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran terbatas, pemerintah terus berusaha untuk membuat kebijakan perlindungan sosial lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Bantuan yang diberikan memang sangat dihargai oleh penerima manfaat, namun seringkali masih belum mencukupi. Banyak keluarga merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari meskipun telah menerima bantuan. Keterbatasan jumlah bantuan menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak keluarga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka, seperti biaya pendidikan dan kesehatan.

Lebih dari sekadar bantuan tunai, kebijakan perlindungan sosial seharusnya juga mencakup langkah-langkah untuk mengatasi akar masalah kemiskinan, seperti rendahnya pendidikan dan akses pekerjaan. Tanpa intervensi struktural, keluarga miskin akan tetap terjebak dalam kemiskinan meskipun menerima bantuan. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki kebijakan ini agar mencakup lebih banyak aspek yang dapat mengangkat kesejahteraan keluarga miskin secara berkelanjutan.

Para pelaksana di lapangan berupaya menerapkan program pemberdayaan ekonomi, namun menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setelah mendapatkan bantuan, masyarakat miskin dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Meskipun pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha telah dicoba, implementasinya masih terbatas dan tidak sepenuhnya efektif.

Dimensi Keadilan

Kebijakan perlindungan sosial di Kota Ambon bertujuan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh keluarga miskin, tanpa diskriminasi. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan akses di daerah terpencil dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Selain itu, distribusi bantuan sering kali tidak merata, yang menjadi perhatian penting dalam memastikan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dinas Sosial terus berupaya agar program perlindungan sosial dapat merata, termasuk di daerah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, masih ada kendala dalam menjangkau daerah terpencil. Oleh karena itu, kerja sama dengan pemerintah desa sangat

diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh keluarga miskin terdaftar dan menerima hak-haknya. Proses ini memerlukan upaya lebih agar tidak ada yang tertinggal.

Dinas Sosial juga gencar melakukan sosialisasi untuk memastikan masyarakat memahami hak mereka terkait bantuan sosial. Meski begitu, beberapa penerima manfaat mengungkapkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka berhak menerima bantuan, yang menghambat pemerataan akses terhadap program ini. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan semua keluarga miskin mendapat informasi yang cukup.

LSM yang mengawasi pelaksanaan kebijakan ini menyoroti adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan. Beberapa kelompok atau individu lebih mudah mendapatkan akses karena adanya koneksi dengan aparat desa atau pihak terkait. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem distribusi yang adil dan merata. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan agar lebih transparan dan adil.

Selain akses yang merata, kebijakan ini juga mengutamakan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas. Kelompok ini sering menghadapi kendala tambahan dalam mendapatkan bantuan karena berbagai faktor, seperti keterbatasan fisik dan sosial. Oleh karena itu, penting agar kebijakan perlindungan sosial memiliki mekanisme khusus yang memudahkan kelompok rentan untuk mendapatkan manfaat secara optimal.

Meskipun ada upaya untuk memberikan prioritas kepada kelompok rentan, pelaksanaannya masih belum optimal. Beberapa kendala yang ditemui antara lain kurangnya pendampingan bagi penyandang disabilitas dan terbatasnya infrastruktur yang ramah bagi mereka. Begitu juga, perempuan kepala keluarga seringkali masih kesulitan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya, meskipun mereka sudah menjadi prioritas dalam beberapa program.

LSM juga mencatat adanya masalah dalam implementasi kebijakan ini, meskipun sudah ada perhatian terhadap kelompok rentan. Kurangnya data akurat dan pemantauan yang langsung di lapangan menjadi hambatan utama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pemerintah untuk melindungi kelompok rentan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar mereka benar-benar dapat menikmati manfaat kebijakan ini.

Transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Meskipun Dinas Sosial menggunakan sistem data terpadu yang diperbarui secara berkala, masalah akurasi data dan mekanisme seleksi yang belum sepenuhnya transparan masih ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi ulang di lapangan untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan penerima bantuan adalah yang benar-benar membutuhkan.

Pendataan dan seleksi penerima manfaat menjadi tantangan besar, terutama karena kondisi ekonomi masyarakat yang sering berubah. Untuk itu, pemerintah terus melakukan pembaruan data secara berkala agar keakuratan informasi tetap terjaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga miskin yang layak menerima bantuan dapat terdata dengan baik, meskipun ada beberapa kendala dalam proses pembaruan data tersebut.

Selain masalah pendataan, pemerataan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi isu penting dalam distribusi bantuan. Di daerah perkotaan, akses bantuan lebih mudah karena infrastruktur yang lebih baik. Sebaliknya, di daerah pedesaan, distribusi sering terkendala oleh faktor geografis dan kurangnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih agar bantuan dapat sampai ke daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau.

Pemerintah terus berusaha meminimalkan kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam penerimaan bantuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah desa untuk memperlancar distribusi bantuan. Meskipun begitu, kesenjangan dalam penerimaan bantuan masih menjadi masalah yang perlu ditangani lebih serius agar distribusi bantuan lebih inklusif dan tidak ada daerah yang tertinggal.

Dimensi Responsivitas

Kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon berfokus pada kesejahteraan kelompok rentan, dengan tujuan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat miskin. Ini tidak hanya mencakup bantuan ekonomi, tetapi juga akses pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat melalui kajian berkala, dialog terbuka, serta penyesuaian dengan perubahan sosial dan ekonomi. Meski begitu, tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya dan perbedaan kebutuhan antara kelompok masyarakat miskin.

Pemerintah terus berusaha untuk menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat melalui survei dan forum konsultasi. Proses ini memungkinkan masyarakat memberikan masukan mengenai kebijakan perlindungan sosial. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran dan kurangnya koordinasi yang optimal antarinstansi. Masih ada tantangan dalam merespons semua aspirasi masyarakat secara efektif, meskipun pemerintah berusaha keras untuk mencari solusi yang tepat.

Dari sudut pandang pemerintah, kebutuhan masyarakat miskin tidak hanya terbatas pada bantuan finansial, tetapi juga pada pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengintegrasikan program pelatihan keterampilan dan akses kerja dalam kebijakan perlindungan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar mereka bisa mandiri dan tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah.

Namun, bagi masyarakat penerima manfaat, bantuan yang diberikan sering kali dirasa tidak memadai. Mereka berharap ada lebih banyak fleksibilitas dalam jenis dan mekanisme bantuan yang disalurkan. Masyarakat menginginkan bantuan yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Tuntutan ini mencerminkan pentingnya responsivitas dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima manfaat.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memberikan masukan penting terkait kebijakan ini. Mereka menekankan bahwa kebijakan perlindungan sosial harus berbasis pada kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena banyak kebijakan yang masih kurang jelas dalam hal komunikasi dan distribusinya. LSM berharap pemerintah dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi dan menerima kritik yang membangun.

Salah satu elemen penting dalam kebijakan ini adalah adanya mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan terkait bantuan yang diterima. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan. Namun, proses tindak lanjut pengaduan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga kerja dan kecepatan respons dari pihak terkait. Hal ini memperlambat penyelesaian masalah yang disampaikan masyarakat.

Beberapa laporan pengaduan datang dari masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan meskipun sudah memenuhi syarat. Untuk menangani hal ini, pemerintah melakukan verifikasi dan mencatat laporan yang diterima sebelum meneruskan ke instansi yang berwenang. Meskipun mekanisme pengaduan telah disediakan, masih terdapat keterbatasan dalam hal efektivitasnya. Masyarakat sering mengeluhkan lambatnya respons terhadap masalah yang mereka hadapi.

Selain mekanisme pengaduan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan sangat penting. Pemerintah berusaha membuka ruang partisipasi melalui musyawarah dan forum konsultasi. Namun, banyak masyarakat yang merasa tidak memiliki pengaruh dalam proses ini atau tidak memahami mekanisme partisipasi yang ada. Oleh karena itu, transparansi dan pemahaman yang lebih baik mengenai proses partisipasi perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta perbedaan kebutuhan di setiap kelompok masyarakat miskin. Meski demikian, upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat melalui survei, forum konsultasi, dan program pemberdayaan ekonomi telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas kebijakan ini.

Meskipun mekanisme pengaduan telah disediakan, efektivitasnya masih terbatas. Banyak pengaduan yang belum ditindaklanjuti dengan cepat, dan masyarakat merasa bantuan yang diberikan belum cukup memenuhi kebutuhan mereka. Keterbatasan respons terhadap keluhan masyarakat, baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya, menjadi hambatan yang harus segera diatasi agar kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan bermanfaat bagi penerima manfaat.

Dalam hal partisipasi masyarakat, meskipun sudah ada upaya untuk membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, masih banyak yang merasa tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, transparansi, fleksibilitas, dan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme partisipasi perlu ditingkatkan. Selain itu,

kebijakan ini perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau bencana alam.

Pemerintah disarankan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memastikan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kebijakan perlindungan keluarga miskin. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah dapat lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik dalam bentuk bantuan finansial maupun pemberdayaan ekonomi. Penguatan mekanisme pengaduan juga perlu dilakukan dengan mempercepat proses tindak lanjut dan memastikan pengaduan ditangani dengan lebih efektif.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu adanya peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan program perlindungan sosial. Pemerintah harus lebih terbuka terhadap masukan masyarakat dan LSM, serta memperbaiki komunikasi dan distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas dan memastikan bahwa bantuan sampai ke mereka yang membutuhkan secara adil dan merata.

DAFTAR REFERENSI

- Berman, P. (2022). *Thinking about Policy Implementation: Analyzing and Evaluating Public Programs*. Stanford University Press.
- Dewi, K. H., Aziz, N. L. L., & Raharjo, S. N. I. (2020). Perempuan kepala daerah dan penanggulangan kemiskinan berperspektif gender di Indonesia.
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn Dalam Tinjauan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) Di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672-691.
- Humalangi, M., Lantapo, N. N., Butolo, I., Arham, M. A., & Tantawi, R. (2023). Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo. Penerbit Tahta Media.
- Kurniawan, R., Alexandri, M. B., & Nurasa, H. (2018). IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 34-38.
- Maipita, I. (2014). Mengukur kemiskinan & distribusi pendapatan. Upp Stim Ykpn.
- Meyers, S. L., & Gray, R. (2014). *Public Policy Implementation: A Guide for Students and Practitioners*. Palgrave Macmillan.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All*. University of California Press.
- Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam

- Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Sosio Informa*, 5(2).
- RI, K. K. D. I. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Sari, A. R. (2021). Implementasi kebijakan kurikulum K-13. Penerbit NEM.
- Slamet, Y. (2012). Modal Sosial dan Kemiskinan. Surakarta: UNS Press.
- Sukei, K. (2015). Gender dan Kemiskinan di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Implementation of Public Policy*. Harper & Row.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.